

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG BERBASIS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KAMPUNG ADAINASNOSEN DISTRIK SAMOFA
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

Rijal

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS Biak
Email : rijal_budiman@iyb.ac.id

Abstrak

Perencanaan adalah suatu proses kegiatan, sedangkan rencana adalah hasil perencanaan kegiatan. Pada dasarnya secara umum perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pembangunan kampung berbasis pemberdayaan masyarakat di Kampung Adainasnosen. Teknik pengumpulan data yang digunakan seperti; observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan proses perencanaan pembangunan yang telah menunjukkan proses yang berbasis pada masyarakat akan tetapi dalam realisasinya hasil perencanaan tersebut masih belum memihak secara penuh kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan pada desa/kampung Adainasnosen belum sesuai dengan harapan dan masih sangat rendah.

Kata kunci: Perencanaan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi yang sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, bahwa untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, perlu adanya kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah kabupaten/kota dan kecamatan desa dalam memberikan sentiment positif yang menuntut adanya ruang terbuka bagi masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan pada perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses dan upaya yang dilakukan suatu kelompok masyarakat secara sistematis untuk mencapai situasi atau kondisi yang lebih baik dari kondisi aktual. Pembangunan perlu mempertimbangkan sumber daya alam

(SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Selain itu, regulasi dalam melakukan pembangunan tersebut juga harus jelas.

Berdasarkan mandat Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pembangunan perlu dilaksanakan secara partisipatif, transparansi. Pembangunan dilakukan Desa/Kampung, dimana desa melakukan pengelolaan pengembangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Disamping itu, selain dapat melakukan pembangunan secara mandiri oleh Desa. Maka suatu perencanaan pembangunan akan tepat mengenai sasaran dan terlaksana dengan baik, dan bermamfaat hasilnya apabila perencanaan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

Untuk memungkinkan hal itu terjadi di Desa maka perlu masyarakat Desa/Kampung terlibat langsung dalam penyusunan rencana demi mewujudkan suatu rencana pembangunan Kampung dalam menciptakan suatu masyarakat adil dan merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah telah membentuk suatu badan yang disebut Badan Musyawara Kampung (BAMUSKAM), yang berfungsi untuk merencanakan, mengontrol dan mengawasi masalah-masalah yang dirasakan oleh masyarakat dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada. Hal ini bertujuan untuk menyusun rencana pembangunan yang lebih bermutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Masyarakat Lokal). Dengan melihat kenyataan yang ada khususnya kampung Adainasnosen sebagai objek penelitian, rencana pembangunan masih belum berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Karena dalam pelaksanaannya rencana pembangunan belum dapat berhasil sepenuhnya sebab pembangunan yang berjalan ini belum dapat diberdayakan atau belum dapat menyentuh seluruh masyarakat Adainasnosen inilah salah satu kerenggangan sosial yang mengakibatkan kesenjangan pembangunan dimana masyarakat Adainasnosen seringkali tersisi dari program pembangunan pemerintah.

Perencanaan atau (*planning*) berasal dari kata *plann* yang artinya rencana, rancangan maksud atau niat. *Planning* berarti perencanaan, jadi, dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu proses kegiatan, sedangkan rencana adalah hasil perencanaan kegiatan. Pada dasarnya secara umum perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan

datang yang diarahkan pada pencapaian tertentu, dengan definisi tersebut, maka perencanaan mempunyai unsur-unsur : (1) Berhubungan dengan hari depan, (2) Mendesain seperangkat kegiatan secara sistematis, dan (3) dirancang untuk mencapai tujuan tertentu (Kunarjo, 1993). Menurut David (2004) perencanaan adalah proses yang dengannya seseorang dapat menentukan apakah akan mencoba melakukan suatu tugas atau tidak mencoba cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan bersiap untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang tidak terduga dengan sumberdaya yang ada. Silalahi (2002) perencanaan secara formal didefinisikan sebagai suatu proses penetapan tujuan (*setting objectives*) yang akan dicapai dan memutuskan strategi dan taktik untuk mencapainya. Menurut Erni dan Sule (2005) bahwa Perencanaan yang baik paling tidak memiliki berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu faktual atau realistis, logis dan rasional, fleksibel, komitmen, dan komprehensif.

Menurut Hani (2012) bahwa Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang kegiatan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber dayanya secara tidak efektif. Tujuan adalah keadaan masa depan yang diinginkan yang ingin direalisasikan organisasi. Tujuan adalah penting karena organisasi ada untuk suatu alasan, dan tujuan mendefinisikan dan menegaskan tujuan alasan tersebut. Rencana adalah cetak biru untuk pencapaian tujuan dan menentukan alokasi sumber daya yang diperlukan, jadwal, tugas, dan tindakan lainnya. Tujuan menentukan tujuan masa depan; rencana menentukan cara hari ini. Sedangkan, menurut Dhafit (2006) mengatakan bahwa konsep perencanaan biasanya

menggabungkan kedua gagasan tersebut; artinya menentukan tujuan organisasi dan menentukan untuk mencapainya.

Menurut Hani (2012) pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya-sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan, adalah sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Setelah keadaan ini dianalisa barulah rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana lebih lanjutnya. Untuk mendapatkan keadaan saat ini diperlukan informasi tentang keuangan dan data statistik perusahaan yang didapatkan melalui komunikasi dalam organisasi.

Pembangunan telah dikemukakan oleh pakar ekonomi, politik maupun pakar sosial. Pengertian pembangunan harus dilihat secara dinamis dan tidak sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir, proses pembangunan adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya. Sondang P. Siagian (1998) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa. Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*national bulding*). Pandangan Coralie Bryant dan lousie White dalam *Managing Development in the Third Worrrld* (1982) yang dikutip oleh Ndraha (1990) mengatakan bahwa pembangunan ialah upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya. Ada lima implikasi utama dari definisi tersebut.

Menurut UU RI Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi provinsi Papua (Bab 1 pasal 1 poin 1) menjelaskan bahwa "Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten / Kota.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kampung Adainasnoson Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor. Pemilihan lokasi penelitian di kampung Adainasnoson ini karena dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan Kampung berbasis pemberdayaan masyarakat lokal terdapat beberapa hal yang menyimpang sehingga pembangunan yang dilakukan kurang maksimal dan tidak memenuhi harapan masyarakat.

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dan kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lain. Selain itu penelitian deskriptif juga terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang hendak diteliti.

Jenis dan Sumber Data

Maka jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua yaitu:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan penelitian, dan juga melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen atau bahan laporan yang tersedia pada lokasi penelitian tentang objek yang diteliti..

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ada dua cara dengan melihat sumber datanya. Adapunteknik yang di gunakan adalah:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dimana penulis secara langsung melakukan pengamatan pada masalah yang akan diteliti di Desa/ Kampung Adainasnosen Distrik Samofa.

2. Interview (Wawancara)

Interview adalah suatu teknik pengumpulan data dimana penulis secara langsung mengajukan pertanyaan lisan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan oleh penulis, dianalisis secara kualitatif yaitu jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perencanaan Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Kampung Adainasnosen.

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang telah berjalan selama ini memberikan dampak terhadap pola perubahan dalam pembangunan dari pembangunan daerah (*regional development*)

ke daerah pembangunan (*local development*). Konsep ini tentu bukanlah pembangunan yang bekerja pada tingkat lokal atau pembangunan daerah semata yang mengacu pada perencanaan yang terpusat melainkan pembangunan yang berbasis pada konteks lokal. Hal ini dilakukan untuk mampu menjawab tantangan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan masalah lokal dengan melakukan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up*) dan partisipatif. Pelaksanaan prinsip ini dikarenakan selalu mengedepankan dalam pembangunan partisipatif yakni pembangunan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.

Pelaksanaan prinsip pembangunan ini tentunya memiliki tujuan yang utama sebagai amanat dari desentralisasi yakni untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tujuan ini dimaksudkan untuk dapat mengurangi kemiskinan yang masih menjadi masalah akut bagi rakyat Indonesia. Kehadiran Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 membawa angin segar bagi pemerintahan desa, hal ini dikarenakan pemerintahan desa memiliki kewenangan yang penuh dalam menjalankan segala bentuk kebijakan yang berkaitan baik dalam hal urusan pemerintahan desa maupun dalam hal menjalankan pembangunan desa.

Undang-undang Desa sebagai dasar hukum atas pelaksanaan pemerintahan desa menjadikan desa memiliki otonominya tersendiri dalam menjalankan pemerintahan desa. Dengan kehadiran undang-undang ini memberikan kewenangan desa untuk menjalankan roda pemerintahannya sebagaimana yang termaktub dalam pasal 18 UU Desa bahwa kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Atas dasar kewenangan yang diberikan sepenuhnya kepada pemerintahan desa inilah segala bentuk pembangunan desa dapat dilaksanakan sebagaimana kewenangan yang telah diberikan. Pembangunan desa yang dimaksudkan bukanlah semata pembangunan dalam bentuk fisik melainkan pembangunan kemasyarakatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yulianus Mansnandifu selaku Kepala Kampung Adainasnosen yang menyatakan bahwa:

“.....Perencanaan pembangunan kampung berbasis pemberdayaan masyarakat lokal di kampung ini meliputi Pembangunan fisik seperti perbaikan perumahan penduduk, jalan-jalan gang kampung. Sedangkan program pemberdayaan yang bersifat non-fisik antara lain pembinaan generasi muda, perbaikan gizi ibu hamil dan balita”.

Untuk pembangunan non-fisik, khususnya pembangunan generasi muda merupakan program utama kepala kampung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yulianus Mansnandifu selaku Kepala Kampung Adainasnosen yang menyatakan bahwa:

“.....Pembangunan bukan hanya bentuk fisik saja. Tapi pembangunan non fisik juga sangat penting yang disini saya maksudkan contohnya saya selalu melakukan dialog terbuka dengan pemuda-pemuda di kampung ini. selalu adakan acara-kumpul-kumpul, menasehati pemuda di sini untuk tidak minum-minuman keras atau berjudi dan tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan senantiasa menjaga keamanan dan perdamaian di

kampung ini juga ada salah satu program pemberdayaan masyarakat yang namanya simpan pinjam yang berasal dari PNPM bekerja sama dengan PKK pemberian pinjamann modal kepada warga di kampung ini dengan bunga yang sangat kecil, bantuan dari PNPM dengan cara berkelompok pembinaan generasi muda di sini dilakukan dengan cara mendekatkan pada sisi keamanan dimulai sejak dini”.

B. Partisipasi Masyarakat

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

Keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Usaha pemberdayaan masyarakat, dalam arti pengelolaan pembangunan desa harus dibangun dengan berorientasi pada potensi viskal, perlibatan masyarakat serta adanya usaha yang mengarah pada kemandirian masyarakat desa.

Pemberian pinjaman modal ini sangat membantu warga masyarakat, khususnya petani muda yang di kampung ini untuk lebih mengembangkan usahanya dalam pertanian dan kewira usaha. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara aktif baik pada pembuatan rencana pelaksanaan maupun penilaian pembangunan menjadi demikian penting sebagai tolak ukur kemampuan masyarakat untuk berinisiatif dan menikmati hasil pembangunan yang telah dilakukan. Dalam meningkatkan dan mendorong munculnya sikap partisipasi, maka yang perlu dipahami oleh pengembang masyarakat adalah kebutuhan-kebutuhan nyata yang dirasakan oleh individu maupun masyarakat.

Partisipasi warga menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga telah mengalih konsep partisipasi "dari sekedar kepedulian terhadap penerima derma atau kaum terisih menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambil keputusan diberbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka. Maka berbeda dengan partisipasi sosial, partisipasi warga memang berorientasi pada agenda penentuan kebijakan publik.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat kampung adainansosen masih belum terlaksana dengan baik sebagaimana strategi perencanaan yang sesungguhnya, dalam arti masyarakat masih belum mendapat kepercayaan penuh dari pemerintah untuk membangun kampung atau dusunnya, masih

terdapat unsur politik dalam keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan pembangunan sehingga masih terdapat wilayah yang bisa dikategorikan kurang mendapat perhatian ataupun sebagian yang mendapat perhatian tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kunarjo, (1993). *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- David, F.R. (2004). *Manajemen Strategis: Konsep*. Edisi ketujuh, PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Silalahi, Ulber, (2002). *Pemahaman Praktis Azas-azas Manajemen*. Bandung: Mandar maju.
- Manulang, M. (1992). *Dasar-dasar Manajemen Cet. XV*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Siagian, Sondang P. (1997). *Manajemen Suatu Pengantar*, Alumni: Bandung.
- Erni T. Kurniawan, dan Sule (2005). *Pengantar Manajemen*. Prenada Media, Jakarta.
- Hani, Handoko T. (2012). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. BPFE: Yogyakarta.
- Arikunto Suharsini, (1997). *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Arikunto Suharsini, (1990). *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta: Jakarta

- Diana Conyers, (1994). *Suatu Pengantar, Perencanaan Sosial, di Dunia ketiga*. UGM Pers: Yogyakarta.
- Husaini Usman, dkk, (2003). *Metodologi Penelitian Sosial*. PT. Bumi Aksara.
- Kuswata Agus Toha, (1984). *Manajemen Pembangunan Desa*. Garafindu Utama: Jakarta
- Kartasasmita, Ginandjar, (1995). *Pemberdayaan Masyarakat, Sebuah Tinjauan administrasi II*. Buletin Alumni SESPAA. Edisi ke-Empat, Jakarta.
- Nawawi, Hadari. (2003) *Metode Penelitian Sosial*. Universitas Gaja Mada Pers: Yogyakarta.
- Siagian, (1996). *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD) Buku I dan III*, Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa.